

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tepatnya pada alenia ke-4 adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban umum dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah-daerah itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, atau antara Provinsi, Kabupaten dan Kota diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, urusan tersebut ada dalam batas dan ruang lingkup wewenang pemerintah. Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Perundangan bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut harus memperhatikan aspirasi daerah sehingga tercipta sinergi antara kepentingan Pusat dan Daerah.

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah dituang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, sedangkan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat seperti:

- a. Politik Luar Negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan Fiskal Nasional; dan
- f. Agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut ini Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri; atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Kebijakan Pembangunan Nasional ditekankan pada terciptanya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dalam suasana tenang dan sejahtera lahir dan batin. Sebagai negara agraris tentunya Indonesia memiliki beberapa sektor yang menjadi andalan mampu menopang kehidupan masyarakat. Salah satunya sektor yang menjadi andalan tersebut adalah sektor pertanian.

Pembangunan disektor pertanian pada tahapan tertentu akan membuat peluang pembangunan agribisnis yang cukup besar, karena bertumpu di atas landasan keunggulan komparatif dalam memproduksi berbagai bahan mentah berupa komoditas perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan serta peluang pasar baik dalam maupun luar negeri (Sutawi, 2003).

Usaha industri merupakan jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan memproses suatu bahan menjadi bahan lain yang sifatnya berbeda dan bernilai tambah. Diantara berbagai sumber pangan, tanaman sagu merupakan tanaman yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu bahan baku yang dapat diproses menjadi bahan pangan dan bahan industri. Tanaman sagu merupakan salah satu komoditi bahan pangan yang banyak mengandung karbohidrat, sehingga sagu merupakan bahan makanan pokok untuk beberapa daerah di Indonesia seperti bagian timur Sulawesi, Irian, Maluku dan daerah pesisir Kepulauan Riau (Harsanto, 1986).

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dan pembentukannya telah ditetapkan berdasarkan UU No 12 tahun 2009 serta sebagai pemerintah kabupaten paling akhir yang dibentuk di wilayah Provinsi Riau sampai 2011. Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3.708 KM² dengan jumlah penduduk 193.939 jiwa yang terdiri dari 5 Kecamatan 5 Kelurahan dan 68 Desa. Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari empat gugus pulau di antaranya Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi.

Kabupaten Kepulauan Meranti selama ini dikenal dengan tanaman sagu untuk beberapa wilayah kecamatannya. Sebagai daerah yang subur dan kaya akan hasil alam melalui pertaniannya, menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan hasil-hasil pertanian untuk daerah-daerah sekitarnya. Hal ini merupakan suatu posisi strategis dalam pengembangan perekonomian daerah di masa mendatang. Dalam konteks ini

diperlukan penanganan yang lebih terencana, terpadu dan komprehensif dalam menata seluruh potensi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan suatu pemerintahan yang lebih menekankan dan memberikan perhatian penuh pada aspirasi masyarakat, pemenuhan hak dasar masyarakat dan berupaya untuk menggerakkan roda perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan setiap potensi dan hasil-hasil produksi daerah yang memiliki keunggulan kompetitif.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari :

1. Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
2. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan ;
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.

Evaluasi dan analisis kerja pada sasaran strategis dalam Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan jumlah produksi pangan komoditas dari perkebunan yang ditetapkan yaitu komoditi sagu. Oleh karena itu untuk mengukur capaian tahun 2015 dipergunakan data statistik perkebunan tahun 2014. Dari data tahun 2015 diperoleh angka realisasi produksi sagu yaitu sebesar 340.197 ton dari target yang ditetapkan. Dari 5 kabupaten sumber penghasil sagu, terdapat 2 kabupaten penyumbang produksi sagu terbesar yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak. Diantara dua kabupaten penyumbang sagu terbesar, Kabupaten Kepulauan Meranti mengungguli kabupaten lainnya. Secara rinci produksi sagu per kabupaten di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel I.1 : Produksi Sagu Provinsi Riau Tahun 2014-2015

No	Kabupaten/Kota	Produksi		Persentase
		2014	2015	
1	Kampar	-	-	-
2	Rokan hulu	-	-	-
3	Pelalawan	914	9.915	0.11
4	Indragiri hulu	-	-	-
5	Kuantan singingi	-	-	-
6	Bengkalis	5.889	1.607	-72.71
7	Rokan hilir	-	-	-
8	Dumai	-	-	-
9	Siak	19.904	46.764	134.95
10	Indragiri hilir	7.457	7.452	-0.07
11	Pekanbaru	-	-	-
12	Kepulauan meranti	91.981	283.459	208.17
Total		126.145	340.197	169.69

Sumber : BPS Propinsi Riau Tahun 2015

Dilihat dari Tabel 1, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada kenaikan produksi yang signifikan, yaitu sebesar 214.052 ton (169,69 %). Kontribusi kenaikan produksi sagu ini berasal dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan dan Siak. Sedangkan 2 kabupaten lainnya yaitu Indragiri Hilir dan Bengkalis mengalami penurunan produksi masing-masing sebesar 0,07 % dan 72,71 %.

Dengan demikian, kinerja Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan, dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja organisasi dalam menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor yang berpengaruh dan berubah dengan cepat, maka dikembangkan model perencanaan pembangunan yang adaptif kreatif yang

intinya mengacu pada Visi, Misi dan program pembangunan yang berbasis pada analisis lingkungan strategis.

Tanaman sagu di Riau didominasi oleh usaha pertanian rakyat yang pada umumnya tumbuh liar dan belum dibudidayakan secara intensif sehingga produktifitasnya rendah. Padahal jika dikelola dengan baik sangat potensial sebagai komoditas yang bernilai tinggi. Sagu sebagai sumber pangan alternatif untuk substitusi beras, dan dapat memperkuat ketahanan pangan. Tidak kalah pentingnya sagu juga digunakan sebagai bahan baku industri seperti untuk membuat mie sagu, kue sagu dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemerintah daerah bersama masyarakat pada era otonomi ini dapat mengolah pati sagu secara berkelanjutan dengan pendekatan pembangunan pertanian berwawasan agribisnis.

Luas area tanaman sagu yang dihimpun oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2015 yaitu 32.022 ha, dengan produksi sekitar 182.494 ton, dan produktifitas 496 ton/ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel I.2: Luas Area Perkebunan Sagu, Produksi dan Produktifitas menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015.

No	Kecamatan	Luas Lahan (ha)	Produksi (ton)	Produktifitas (ton/ha)
1	Tebing Tinggi Barat	8.856	61.317	692
2	Tebing Tinggi	356	2.752	774
3	Tebing Tinggi Timur	14.164	57.774	408
4	Rangsang	123	358	291
5	Rangsang Pesisir	2.190	14.535	664
6	Rangsang Barat	165	1.485	900
7	Merbau	5.203	13.185	253
8	Pulau Merbau	965	7.283	755
9	Pulau Puyu	3.056	23.805	779
Jumlah Total		32.022	182.494	496

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepulauan Meranti 2016

Pada tabel di atas, dapat dilihat Kecamatan Tebing Tinggi hanya memiliki tanaman perkebunan sagu seluas 356 ha, dengan produksi 2.752 ton dan produktifitas sebanyak 774 ton/tahun, tetapi di kecamatan ini mempunyai industri terbanyak kedua dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu berjumlah 85 industri, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel II.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sumber daya alam, baik disektor migas maupun non migas. Disektor migas berupa minyak bumi dan gas alam, yang terdapat di kawasan Pulau Padang. Disektor non migas, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi beberapa jenis perkebunan seperti sagu, kelapa, karet, pinang dan kopi. Hingga kini hasil perkebunan hanya diperdagangkan dalam bentuk bahan baku keluar daerah Riau dan belum diolah menjadi beberapa produk industri, sehingga belum membawa nilai tambah yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada sektor perkebunan rakyat, sagu merupakan tanaman unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti yang dapat menggantikan peran beras yang banyak diusahakan disemua Kecamatan. Selain untuk konsumsi masyarakat, produksi sagu Kabupaten Kepulauan Meranti juga diekspor ke luar daerah. Dengan adanya hal tersebut memicu timbulnya usaha industri, seperti industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri mikro. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel I.3 : Jumlah usaha industri di Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Kecamatan dan jenis pada tahun 2014-2016

No	Kecamatan	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Tebing Tinggi Barat	92	97	303
2	Tebing Tinggi	150	171	175
3	Tebing Tinggi Timur	85	103	116
4	Rangsang	282	285	258
5	Rangsang Barat	127	127	141
6	Rangsang Pesisir	43	45	69
7	Merbau	139	147	139
8	Pulau Merbau	100	100	149
9	Tasik Putri Puyu	303	310	296
	Jumlah	1321	1385	1646

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016

Pada tabel 3 maka dapat dilihat bahwa jumlah pelaku usaha ukm di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2014 samapi 2016 sangat berkembang pesat, ini dibuktikan pad tahun 2014 berjumlah1321 pelaku usaha dan pada tahun 2015 serta 2016 berjumlah 1385 dan 1646 pelaku usaha UKM sagu. Prilaku produksi pada dasarnya merupakan usaha dari seseorang atau beberapa orang untuk lepas dari kemiskinan. Di samping itu produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Bahwa nilai moral yang menjadi motif

perilaku adalah keutamaan mencari nafkah, dan berusaha pada sesuatu yang halal. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu diantaranya dengan melakukan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Kedudukan usaha kecil dan menengah dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Disamping itu usaha kecil dan menengah juga memiliki potensial penghasil devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu.

Secara umum usaha kecil dan menengah memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, kenyataannya masih banyak masalah yang menghadang dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam hal ini adalah kelemahan akses informasi dan perluasan pangsa pasar, kelemahan akses dan pemupukan modal, kelemahan akses pada informasi dan teknologi, kelemahan dalam manajemen organisasi, serta kelemahan dalam pembentukan jaringan usaha dan kemitraan. Kesemuanya ini berdampak pada rendahnya kualitas produk dan jasa sehingga kurang memiliki daya saing, baik dalam pasar lokal, nasional, maupun internasional.

Ketika masyarakat setempat melakukan kegiatan produksi yakni sagu yang mana menjadi sumber mata pencarian. Keberadaan pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk membantu serta mengarahkan para pelaku atau perajin sagu ke arah yang dapat membawa perubahan terhadap kehidupan finansial para perajin, berperan penting untuk mewujudkan kesejahteraan petani yang mana dengan program serta kebijakan akan mampu membuat produktifitas hasil sagu tersebut dapat berdaya saing serta memiliki nilai jual yang tinggi, instansi

pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karena itu maka disini butuh peran pemerintah dalam mensejahterakan petani sagu, karena sebagian dari hasil sagu ini di ekspor ke luar negeri dan bisa menjadi devisa Negara.

Tabel 1.4: Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang Mendapat Bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Nama Pelaku Usaha	Bantuan yang Diberikan	Nama Produk
1	Ibnu Hakim	Pelatihan	Mie Sagu
2	Zor Umar	Pelatihan	Sagu Rendang
3	Farida	Pengolahan	Cendol Sagu
4	Azam Jamil	Pelatihan	Kue Bangkit Sagu
5	Maryana	Pengemasan	Kerupuk Sagu

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Olahan Penulis 2016

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain:

Tugas pokok: Melaksanakan urusan pemerintah dibidang koperasi, usaha kecil menengah (UKM) dan perindustrian perdagangan berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

Fungsi pokok :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dibidang koperasi, UKM dan industri perdagangan.

- 2) Melaksanakan tugas teknis operasional dibidang koperasi, UKM dan industri perdagangan yang meliputi industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan, kelembagaan dan pendaftaran pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam dan usaha kecil menengah.
- 3) Meningkatkan pembinaan terhadap para pelaku UKM, pembangunan usaha koperasi agar usaha kecil dan menengah memiliki daya saing usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM.
- 5) Meningkatkan peranan koperasi dan UKM yang berdaya saing.
- 6) Meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UKM.
- 7) Menguatkan struktur industri dengan memberdayakan potensi UKM dan berwawasan lingkungan.
- 8) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mendorong serta mengembangkan hasil produksi melalui media promosi dan pameran dagang.
- 9) Desperindag memberikan bantuan terhadap para pelaku UKM bukan berbentuk dana namun memberikan alat perlengkapan dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Dalam rencana strategi tahun 2011-2016 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat rencana dalam mengembangkan UKM dan koperasi antara lain :

1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM. Program ini bertujuan meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha antara koperasi, UKM, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Dengan cara menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan meningkatkan keterampilan teknis UKM unggulan.
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. Program ini bertujuan meningkatkan serta memperkuat permodalan koperasi dan UKM melalui kerjasama dengan pihak perbankan dalam menunjang ekonomi kerakyatan. Namun pada kenyataannya, Pembina Koperasi Pedagang Pasar, yang juga anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah, pernah menyampaikan keluhan terkait tak adanya bantuan Pemda untuk modal usaha perdagangan masyarakat. Ternyata, tahun ini jenis bantuan itu memang tidak dianggarkan.

Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Kepulauan Meranti, Syamsuar Ramli, ia menyampaikan tahun 2014-2015 tidak dianggarkan, namun kalau memang ada permintaan, maka akan dianggarkan lagi tahun depan. "Tahun Anggaran 2013-2014 lalu sudah kita alokasikan Rp.200 juta untuk koperasi pedagang harapan bersama (koperasi pasar), memang tahun ini tidak ada," kata Syamsuar. Dikatakan Syamsuar, kalau kedepannya memang ada permintaan, tahun depan (2015-2016) Disperindagkop-UKM kembali akan menganggarkannya, namun diminta juga agar dewan tidak intervensi urusan ini nantinya dalam pembahasan Badan Anggaran. Ia mengakui, saat ini banyak masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti terbelit hutang dengan para rentenir

dan tengkulak yang berkedok koperasi. "Kita sangat setuju kalau koperasi-koperasi resmi dan berjalan sesuai aturan dihidupkan kembali. Tahun depan kita anggarkan secara maksimal, tapi mohon juga usulan kami nanti disambut baik oleh DPRD, sehingga masyarakat kita dapat segera terbantu," kata Syamsuar.

Berdasarkan hasil pra survei di lapangan terkait dengan Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha Kecil Menengah. ditemui fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya bantuan modal usaha yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
2. Minimnya alat-alat pengolahan yang digunakan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut dan masih tradisional terutama dalam pengolahan sagu.
3. Belum meratanya pelatihan khusus yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap UKM terutama pada perajin sagu.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha Jenis Sagu Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu : *“Bagaimana Peranan Dinas Perindustrian*

dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha Jenis Sagu Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha Kecil Menengah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis, menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya yaitu mensejahterakan petani sagu dan perajin sagu.
- c. Secara akademik, dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dimasa akan datang.